

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini lembaga keuangan berlabel syariah berkembang pesat dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah bahasa arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syariat islam ataukah hanya rekayasa semata. Melihat dari ulasan diatas peneliti akan membahas satu dari berbagai produk yaitu murabahah.

Perbankan syariah di Indonesia hadir ketika perekonomian bangsa menurun secara drastis hingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Fungsi dari bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi, lembaga yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan yang diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan.<sup>1</sup>

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia didasari oleh Undang-undang no 7 tahun 1992 dan kemudian digantikan dengan undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, kemudian landasan selanjutnya adalah undang-undang no 21 tahun 2008, undang-undang ini memberikan dampak positif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di bank syariah. Sehingga dengan kepercayaan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan asset

---

<sup>1</sup> Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad murabahah* (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No 1, Maret 2007,) 66

perbankan syariah di Indonesia.<sup>2</sup> Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk

Adapun dipilihnya PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) cabang Malang oleh peneliti karena PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) adalah salah satu bank yang menawarkan pembiayaan menggunakan akad murabahah, selain itu juga melihat dari perkembangannya BRI syariah adalah salah satu bank yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dengan hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai ke syariahan yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Undang-undang tentang perbankan syariah hadir sebagai salah satu bentuk upaya untuk merealisasikan kontribusi masyarakat dalam perekonomian yaitu dengan system ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah prinsip hukum syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan akan penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> UU No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.

Pengoprasional bank syariah butuh kepada pembinaan dan pengawasan dengan tujuan untuk melegalisasikan serta melindungi akad-akad yang digunakan pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip Syariah. Upaya tersebut direalisasikan dalam bentuk pengawasan yang dibentuk oleh sebuah lembaga yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar bagi suatu tindakan hukum. Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara structural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>4</sup>

Fungsi perbankan syariah dalam murabahah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan dan kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian barang tersebut dijual kembali oleh bank kepada nasabah dengan harga jual yang sama dengan harga beli dan ditambah keuntungan bank. Dalam hal ini bank memiliki kewajiban untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini dijelaskan bahwa bank tidak memberikan uang kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhannya, karena murabahah adalah jual beli komoditas bukan merupakan transaksi dalam bentuk memberi pinjaman dengan menggunakan bunga<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wirdyaningsih,dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media,2007),80

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h 104.

Terdapat perkembangan akad dalam pelaksanaan murabahah pada perbankan syariah, perkembangan akad tersebut disebabkan dengan adanya penyertaan *akad wakalah*, penyertaan *akad wakalah* yang dilakukan oleh bank syariah untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, dengan adanya penyertaan akad wakalah hal itu merubah fungsi bank sebagai penjual dalam murabahah, sebagaimana dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwanya fungsi bank dalam murabahah ialah sebagai penjual dengan menjual barang kepada nasabah bukan memberikan uang kepada nasabah. Pemberian uang tunai oleh bank kepada nasabah lebih tepat disebut dengan akad pinjaman atau hutang nasabah untuk menutupi kekurangan modal nasabah dalam membeli barang kepada supplier (pemasok atau penjual).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat tentang hal yang menyatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Maka dari itu perlu penjelasan dan kepastian terhadap pelaksanaan system murabahah yang ada di bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah serta pengaplikasiannya terhadap akad murabahah. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana akad murabahah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) apakah telah sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam ilmu fiqih dan teori dari para ulama, untuk itu peneliti memilih salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Malang yaitu BRI Syariah sebagai tempat penelitian tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat ialah: Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Perspektif Fatwa DSN-MUI?

## **C. Tujuan Masalah**

Untuk Mengetahui Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Di BRI Syariah KC Malang Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI

## **D. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas adapun penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana sistem murabahah bil wakalah yang ada di BRI Syariah KC Malang serta bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual hukum syariah dan bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang fiqh muamalah dan bidang keilmuan lainnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, selain itu juga untuk menambah keilmuan yang nantinya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari yang memberikan pengetahuan tentang system murabahah yang ada di bank syariah.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan oleh lembaga sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan, pertimbangan kebijakan serta pengembangan konsep yang digunakan bank dalam pembiayaan murabahah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih terhadap system akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil atau membahas judul yang sama

## **F. Definisi Istilah**

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, berikut adalah cangkupan-cangkupan pembahasan dalam penelitian ini:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi elemen-elemen dasar penelitian diantaranya ialah, latar belakang, didalamnya menjelaskan sebuah konsep dasar pemikiran tentang pentingnya penelitian untuk dilakukan yang berisi keadaan yang terjadi pada



saat ini dipadu dengan teori yang berhubungan sehingga terjadinya kesenjangan yang menjadi alasan peneliti melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang mencakup fokus permasalahan yang ingin diteliti. Tujuan penelitian, yang menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, manfaat penelitian, menjelaskan manfaat secara teoritis dan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penelitian terdahulu, sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan.

## BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan mengenai aspek-aspek teoritik konsep akad dan *murabahah* yang dilihat dari sudut pandang secara umum. Adapun yang perlu dibahas didalamnya yaitu mengenai pengertian, syarat dan rukun serta jenis-jenis yang berkaitan dengan konsep *akad murabahah bil wakalah*.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Pada Bab metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat di Bab satu tentang tentang Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Perspektif Fatwa DSN-MUI?

## BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang dikaji dengan meninjau kembali hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut, serta memberi saran kepada mahasiswa sebagai bahan kajian

### G. Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti            | Judul  | Kesimpulan   |
|----|--------------------------|--|--|
| 1. | Roifatus Syauqoti (2018) | Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. | Aplikasi murabahah bil wakalah yang sah adalah bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan |



|    |                                      |  |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
|    |                                      |  | setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.  |
| 2. | Fanny Yunita<br>Sri Rejeki<br>(2013) | Akad Pembiayaan<br>Murabahah dan Praktiknya<br>Pada PT Bank Syariah<br>Mandiri Cabang Manado | Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang |

|    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
|    |                               |   | kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.   |
| 3. | Yassar<br>Wildantyo<br>(2016) | Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP KUDUS | <p>75 persen pembiayaan mikro BRI Syariah iB disalurkan pada pedagang pasar dengan komposisi terbesar pedagang sembilan bahan pokok (sembako) dan pedagang pakaian, sedangkan sisanya sebesar 25 persen di salurkan ke komunitas usaha lainnya.</p> <p>Dalam prakteknya akad inisangat mirip dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional, perbedaannya hanya pada pengambilan keuntungan dimana bank konvensional langsung mengambil dari presentase besar pokok pinjaman sedangkan bank syariah mengambil dari margin</p> |

|    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
|    |                                 |   | atau keuntungan dari harga pokok objek.   |
| 4. | Rafi Helmi<br>Farizqi<br>(2016) | Analisis Pembiayaan<br>Murabahah Unit Mikro<br>Pada BRI Syariah Kantor<br>Cabang Pembantu<br>Ungaran                            | Penelitian ini membahas tentang bagaimana operasional pembiayaan Murabahah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan kepada masing-masing calon nasabah pembiayaan. Di bank BRI Syariah.  |
| 5. | Wike Ariska<br>(2018)           | Penerapan Akad<br>Murabahah Bil Wakalah<br>dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat)<br>Mikro di PT. BRI Syariah<br>KCP STABAT | Pembiayaan dengan akad murabahah ini adalah pembiayaan paling dominan di Bank BRI Syariah KCP Stabat dan merupakan produk unggulan. Pembiayaan ke sektor mikro menjadi salah satu fokus pembiayaan BRI Syariah, mekanisme yang terjadi adalah dengan murabahah bil wakalah. Pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah berkisar |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Rp5 juta sampai Rp. 500 juta dengan 3 pilihan plafon pembiayaan, yaitu 25 juta-75 juta, 75 juta – 200 juta, 200 juta – 500 juta. Dilaporkan bahwa 75 persen pembiayaan mikro BRI Syariah iB disalurkan pada pedagang pasar dengan komposisi terbesar pedagang sembilan bahan pokok(sembako) dan pedagang pakaian, sedangkan sisanya sebesar 25 persen disalurkan kekomunitas usaha lainnya. Murabahah bil wakalah yang terjadi kurang sesuai dengan apa yang ada di Fatwa DSN MUI, karena disana tidak menyebutkan adanya akad wakalah didalamnya, dan pihak bank belum dapat menjelaskan mengapa ada tambahan wakalah didalamnya.</p> |
|--|--|--|---|